

Portofolio Akuntansi Sektor Publik

Anggota Kelompok

1. Ni Wayan Vara Wulandari (2313031017)
2. Tazki Alfikri (2313031028)

Artikel 1 (National)

Judul Artikel: Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Link Jurnal: <https://ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/view/2660>

Analisis:

Artikel ini membahas permasalahan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Kota Medan, yang meskipun beberapa kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tetap menunjukkan banyak penyimpangan dan potensi kerugian keuangan yang tinggi. Pemerintah daerah Kota Medan terduga melakukan penggelapan dana setoran pajak dari Samsat, hotel, restoran, dan sektor lainnya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya sehingga masalah utama yang diangkat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, lemahnya sistem pengendalian intern, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi standar SAP.

Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah mengaji dan menganalisis pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan, terutama dalam konteks fenomena meningkatnya opini audit namun tetap tingginya kasus penyimpangan. Pembahasannya menyoroti perkembangan otonomi daerah, penerapan prinsip good governance, kewajiban review laporan keuangan oleh APIP, perbandingan opini audit BPK dari tahun ke tahun, hingga kasus-kasus penyimpangan yang muncul di Kota Medan. Dari keseluruhan uraian tersebut,

disimpulkan bahwa meskipun Kota Medan memperoleh opini WTP, kualitas pelaporan keuangannya belum optimal karena transparansi masih lemah, SDM belum kompeten, dan masih terdapat banyak penyimpangan, sehingga perlu peningkatan tata kelola keuangan dan komitmen transparansi untuk menghasilkan laporan yang benar-benar andal dan sesuai standar.

Artikel 2 (National)

Judul Artikel: Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Link Jurnal: <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3475>

Analisis:

Artikel ini merupakan kajian mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan fokus pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Masalah yang diangkat adalah rendahnya transparansi dan minimnya pemahaman pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat, terlihat dari kasus salah satu kecamatan yang tetap tidak transparan meski berulang kali memperoleh opini WTP, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang layak mengenai kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan menilai bagaimana akuntabilitas dan transparansi memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Pembahasan artikel ini meliputi konsep etika akuntabilitas, peran pemerintah daerah sebagai agen masyarakat, fungsi pengawasan DPRD, serta temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh positif akuntabilitas dan transparansi terhadap integritas dan kualitas laporan keuangan. Simpulannya adalah bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi secara konsisten sangat diperlukan agar Pemerintah Kabupaten Sleman dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, relevan, dan sesuai kebutuhan publik.

Artikel 3 (National)

Judul Artikel: Akuntansiasi atau Akuntansia? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Link Jurnal: <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/162>

Artikel ini merupakan kajian kritis mengenai masuknya ide New Public Management (NPM) ke dalam birokrasi sektor publik dan bagaimana hal tersebut memengaruhi regulasi serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masalah utama yang diangkat adalah bahwa NPM, dengan asumsi superioritas teknik manajemen sektor privat, telah mendorong terjadinya “akuntansiasi” dalam sektor publik yang menggeser orientasi pemerintah dari nilai-nilai kepublikan menjadi berorientasi pasar dan efisiensi, sehingga membuka ruang liberalisasi dan penetrasi kapitalisme global ke dalam tata kelola negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara kritis bagaimana doktrin-doktrin NPM merasuk ke dalam regulasi pemerintah dan SAP, serta membuktikan bahwa SAP berbasis akrual lebih merupakan “akuntansiana” daripada “akuntansiasi,” karena melemahkan karakter publik sektor pemerintahan.

Pembahasan artikel mencakup kritik terhadap birokrasi, konsep dasar NPM dan tujuh doktrinnya, kebutuhan informasi keuangan dalam kerangka efisiensi, pergeseran basis kas ke basis akrual, proses akuntansiasi, pengaruh desentralisasi, dan bagaimana kekuatan institusi global seperti IMF, Bank Dunia, dan adopsi IPSAS/IFRS mendorong agenda pasar dalam sektor publik. Simpulannya adalah bahwa penerapan NPM melalui reformasi akuntansi dan kebijakan desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kapitalisme global yang mengurangi nilai kepublikan sektor pemerintah, sehingga perlu dikaji kembali agar standar akuntansi dan regulasi tidak menjadi alat liberalisasi melainkan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Artikel 4 (International)

Judul Artikel: Navigating Accounting Reforms: A Qualitative Comparative Analysis Of Accrual Implementation In Italian Local Governments

Link Jurnal: <https://www.emerald.com/jpbafm/article/37/6/1/1267553/Navigating-accounting-reforms-a-qualitative>

Analisis:

Artikel ini membahas akuntansi sektor publik dan transisi menuju akuntansi berbasis akrual, terutama dalam konteks Italia, sebagai bagian dari tren global yang dipengaruhi oleh New Public Management (NPM) dan rekomendasi organisasi internasional seperti OECD dan IMF. Masalah yang diangkat adalah keterbatasan praktik akuntansi sektor publik saat ini, di mana banyak pemerintah masih menggunakan basis kas termodifikasi yang tidak selalu menyediakan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas, serta perbedaan persepsi mengenai kegunaan laporan keuangan berbasis akrual. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi kondisi-kondisi yang membuat manajer akuntansi sektor publik menilai akuntansi berbasis akrual sebagai berguna dibandingkan sistem kas termodifikasi, karena persepsi mereka dianggap krusial untuk keberhasilan implementasi reformasi.

Pembahasan artikel mencakup tinjauan literatur internasional tentang transisi akuntansi, perkembangan akuntansi sektor publik di Italia, relevansi dan keterbatasan laporan berbasis akrual, serta pentingnya perspektif manajer akuntansi sebagai penghubung antara keputusan politik dan pelaksanaan administrasi publik. Simpulan artikel ini menekankan bahwa persepsi manajer akuntansi sektor publik terhadap kegunaan akuntansi berbasis akrual sangat menentukan keberhasilan reformasi, dan meskipun Italia berada dalam fase transisi menuju penerapan penuh akuntansi akrual, masih ada tantangan signifikan terkait nilai informasi dan kegunaan laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan.

Artikel 5 (International)

Judul Artikel: Human-Robot Collaboration And Sustainable Development: Role Of Circular Management Accounting Data Analytics With Government Support

Link Jurnal: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291125008368>

Analisis:

Artikel ini membahas peran kolaborasi manusia-robot (Human-Robot Collaboration/HRC) dan analitik akuntansi manajemen sirkular (Circular Management Accounting Data Analytics/CMADA) dalam meningkatkan kinerja berkelanjutan (Sustainable

Performance/SP) di organisasi layanan publik (PSEOs) di negara berkembang, dengan memperhatikan dampak transformasi digital, Industri 5.0, dan ekonomi sirkular. Masalah yang diangkat adalah tekanan PSEOs untuk mengintegrasikan praktik keberlanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam operasional mereka, sementara banyak organisasi menghadapi keterbatasan sumber daya dan kesulitan memanfaatkan akuntansi manajemen tradisional untuk mendukung praktik ekonomi sirkular.

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi pengaruh HRC terhadap SP, peran mediasi CMADA dalam hubungan tersebut, dan peran moderasi dukungan pemerintah (Government Support/GOS) dalam meningkatkan efektivitas implementasi HRC dan CMADA. Pembahasan artikel mencakup literatur tentang ekonomi sirkular, Industri 5.0, big data dan AI dalam akuntansi manajemen, pentingnya keterlibatan manusia dalam kolaborasi dengan robot, serta strategi pemerintah untuk mendukung inovasi dan praktik keberlanjutan. Simpulan penelitian menekankan bahwa integrasi HRC dan CMADA dapat menjadi sumber daya berharga yang meningkatkan kinerja berkelanjutan PSEOs, dengan dukungan pemerintah sebagai faktor penting untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi dan praktik ekonomi sirkular, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam transformasi digital dan keberlanjutan sektor publik di negara berkembang.

Artikel (Internet)

Judul Artikel: Dana Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas, Pajak Rakyat Berpotensi Meroket

Link Website: <https://www.kppod.org/berita/view?id=1441>

Analisis:

Artikel ini membahas pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 dan dampaknya terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Masalah yang diangkat adalah ketergantungan sebagian besar daerah—sekitar 60-70 persen, bahkan ada yang 80-90 persen—terhadap transfer pusat, sehingga pemangkasan TKD sebesar 24,8 persen dari Rp864,1 triliun menjadi Rp650 triliun berpotensi mengganggu pelayanan publik, belanja modal, dan pembangunan infrastruktur. Tujuan artikel ini adalah menganalisis dampak kebijakan efisiensi

anggaran pemerintah pusat terhadap ketahanan fiskal daerah, perilaku pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan alternatif, dan potensi konflik dengan masyarakat akibat kenaikan pajak daerah.

Dalam pembahasan, berbagai pihak seperti KPPOD dan Celios menekankan bahwa pemangkasan TKD memaksa daerah mencari PAD melalui peningkatan pajak, yang berisiko memicu protes publik seperti di Kabupaten Pati, sementara pemerintah pusat menekankan efisiensi hanya sebagian kecil dari total transfer dan manfaat belanja pusat tetap dirasakan masyarakat. Artikel juga menyoroti usulan alternatif pajak yang lebih berkeadilan, misalnya pajak rumah ketiga dan pajak kekayaan, agar beban tidak jatuh pada masyarakat menengah ke bawah. Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pemangkasan TKD meningkatkan tekanan fiskal daerah, mendorong kenaikan pajak yang berpotensi menimbulkan protes, dan menekankan perlunya perencanaan fiskal yang lebih adil dan inovatif antara pemerintah pusat dan daerah.

Artikel (Internet)

Judul Artikel: Anggaran Riset Kemendiktisaintek Dipangkas, Pakar UGM Sebut Pemerintah Korban Efektivitas dan Daya Saing Bangsa

Link Website: <https://share.google/pPpZSQwyFyuOoAlZN>

Analisis

Artikel ini membahas pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu Rp56,6 triliun dalam kerangka kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres 1 Tahun 2025. Masalah yang diangkat adalah potensi dampak pemotongan anggaran terhadap efektivitas pendidikan tinggi, riset, dan inovasi, termasuk terganggunya perencanaan program perguruan tinggi serta kemampuan dosen dan mahasiswa menjalankan penelitian. Tujuan artikel ini adalah menyoroti implikasi pemangkasan anggaran terhadap sektor pendidikan tinggi, efektivitas riset, dan perlunya strategi alternatif untuk mempertahankan kinerja akademik.

Dalam pembahasan, narasumber menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya selaras dengan efektivitas, sehingga pemotongan yang terlalu besar berisiko menghambat riset dan

inovasi, dan perguruan tinggi perlu mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan industri dan lembaga internasional. Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pemangkasan anggaran tanpa perencanaan matang dapat mengancam pencapaian tujuan pendidikan dan riset, sehingga efisiensi harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertahankan peran negara dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Artikel (Internet)

Judul Artikel: Guru Besar FEB UGM Sebut Efisiensi Anggaran Pendidikan Harus Dilakukan dengan Hati-Hati

Link Website: <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/11553-guru-besar-feb-ugm-sebut-efisiensi-anggaran-pendidikan-harus-dilakukan-dengan-hati-hati>

Analisis

Artikel ini membahas implikasi pemangkasan anggaran pendidikan tinggi dan pendidikan secara umum di Indonesia dalam kerangka kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Masalah utama yang diangkat adalah potensi dampak negatif pemotongan anggaran terhadap kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan dosen, beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta risiko perguruan tinggi negeri (PTN) terpaksa menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tujuan artikel ini adalah menyoroti bagaimana efisiensi anggaran sebaiknya diterapkan tanpa mengorbankan efektivitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam pembahasan, narasumber menekankan bahwa pemotongan anggaran harus selektif, menyoroti sektor administratif dan non-esensial, tetap memperhatikan dampak ekonomi lokal, dan tidak mengurangi hak serta kesejahteraan guru, dosen, dan siswa miskin; pemerintah juga harus memastikan implementasi dana pendidikan tepat sasaran dan mempertimbangkan efisiensi struktural pemerintahan. Simpulan artikel ini adalah bahwa efisiensi anggaran pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati, menyeimbangkan penghematan dengan keberlanjutan kualitas pendidikan, agar masa depan generasi muda dan pembangunan peradaban bangsa tidak terganggu.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Link Laporan Keuangan:

<https://ipkd.bandarlampungkota.go.id/uploads/65466884e6ff418e0a7d42fc5ceaf787.pdf>

Analisis

Dokumen Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan kelebihan yang signifikan dalam penerapan prinsip fundamental akuntansi sektor publik, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Paragraf pertama berhasil menunjukkan orientasi yang jelas pada akuntabilitas publik dengan menyebutkan berbagai jenis informasi yang disediakan, mulai dari pendapatan, alokasi anggaran, hingga sumber daya ekonomi yang digunakan. Hal ini mencerminkan penerapan konsep value for money dalam akuntansi sektor publik, di mana pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan, tetapi juga hasil-hasil yang telah dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut. Pendekatan multi-stakeholder yang diadopsi juga mengakui keberagaman pengguna laporan keuangan sektor publik, mulai dari masyarakat, legislatif, hingga lembaga pengawas. Namun demikian, paragraf ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu dicermati. Uraian yang disajikan cenderung terlalu normatif dan idealistik tanpa menjelaskan bagaimana tujuan-tujuan mulia tersebut secara konkret akan dicapai dalam praktik sehari-hari. Paragraf ini juga tidak menyebutkan tantangan atau keterbatasan yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan sektor publik, serta kurang menjelaskan mekanisme feedback atau evaluasi dari stakeholders terhadap informasi yang disajikan, padahal aspek ini penting dalam menciptakan siklus akuntabilitas yang berkelanjutan.

Landasan hukum yang komprehensif dalam paragraf kedua menunjukkan kelebihan berupa compliance yang kuat terhadap regulasi, yang mencerminkan praktik good governance dalam akuntansi sektor publik. Rujukan pada berbagai peraturan mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Wali Kota memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap laporan keuangan yang disusun, sekaligus memudahkan proses audit dan pemeriksaan oleh BPK. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengikuti best practice internasional dalam reformasi akuntansi sektor publik. Hierarki peraturan yang jelas dari tingkat pusat hingga daerah mencerminkan sistem hukum yang terstruktur dengan baik. Namun di sisi lain, paragraf ini menampakkan kelemahan signifikan berupa pendekatan yang terlalu legalistik

dan birokratis. Banyaknya regulasi yang disebutkan tanpa penjelasan keterkaitan antar regulasi tersebut membuat paragraf ini terkesan seperti daftar peraturan yang kaku dan kurang memberikan pemahaman substansif. Pendekatan rule-based yang sangat dominan dapat mengurangi ruang bagi professional judgment yang sebenarnya penting dalam akuntansi sektor publik untuk menghadapi situasi-situasi khusus. Lebih jauh lagi, tidak adanya penjelasan mengenai tantangan implementasi berbagai regulasi tersebut, terutama dalam konteks transisi dari basis kas ke basis akrual, membuat paragraf ini kehilangan dimensi praktis dan realistis yang seharusnya menjadi bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan yang berkualitas.

REFERENSI

- Benfante, G., Casali, A., Mozzoni, I., & Ferretti, M. (2024). *Navigating Accounting Reforms: A Qualitative Comparative Analysis Of Accrual Implementation In Italian Local Governments*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 37, No 6.
- Huy, P, Q., Phuc, V, K. (2025). *Human-Robot Collaboration And Sustainable Development: Role Of Circular Management Accounting Data Analytics With Government Support*. *Journal Social Science and Humanities*. Vol. 12, No 1.
- Maulana, Z., Lubis, N, K. (2020). *Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan*. Vol. 4, No 1.
- Zubaidah, A, N., & Nugraeni, N. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. Vol. 7, No 3.
- Kamayanti, A. (2011). *Akuntansiasi atau Akuntansia? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Vol. 2, No 3.
- Dana Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas, Pajak Rakyat Berpotensi Meroket. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1441>
- Anggaran Riset Kemendiktisaintek Dipangkas, Pakar UGM Sebut Pemerintah Korban Efektifitas dan Daya Saing Bangsa. <https://share.google/pPpZSQwyFyuOoAlZN>

Guru Besar FEB UGM Sebut Efisiensi Anggaran Pendidikan Harus Dilakukan dengan Hati-Hati.

<https://feb.ugm.ac.id/id/berita/11553-guru-besar-feb-ugm-sebut-efisiensi-anggaran-pendidikan-harus-dilakukan-dengan-hati-hati>

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

<https://ipkd.bandarlampungkota.go.id/uploads/65466884e6ff418e0a7d42fc5ceaf787.pdf>